

## Implementasi kebijakan zonasi ppdb di smp negeri 5 yogyakarta dalam perspektif model grindle

Eka Putri Setyowati<sup>1\*</sup>, Hanifa Intan Ramadani<sup>2</sup>, Muhammad Darrin Abdul Mugni<sup>3</sup>, Muhammad Saiful Anwar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [eka447fipp.2024@student.uny.ac.id](mailto:eka447fipp.2024@student.uny.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of the zoning policy in the New Student Admission System (PPDB) at SMP Negeri 5 Yogyakarta from the perspective of the Grindle Model. The zoning policy was implemented by the government as an effort to equalize access and quality of education; however, various obstacles and differences in public perception are still found in its implementation. This research used a qualitative approach with a descriptive case study method. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies related to the implementation of the PPDB zoning policy. The analysis was conducted based on the aspects of content of policy and context of implementation in the Grindle Model. The results showed that the implementation of the zoning policy at SMP Negeri 5 Yogyakarta has been carried out in accordance with existing regulations and supported by an online implementation system and clear technical guidelines. The policy has contributed to improving equal access to education for communities surrounding the school. Nevertheless, several obstacles remain, such as the lack of public understanding regarding the zoning system, unequal distribution of school quality, and administrative constraints in the student admission process. In addition, the zoning policy has influenced public perceptions regarding favorite schools. This study concludes that the success of zoning policy implementation is influenced by policy communication, the readiness of school resources, and support from the community and government in its implementation.*

**Key Words:** zoning policy; ppdb; policy implementation; grindle model; educational equity

### Abstrack

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 5 Yogyakarta dalam perspektif Model Grindle. Kebijakan zonasi diterapkan pemerintah sebagai upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala dan perbedaan persepsi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB. Analisis dilakukan berdasarkan aspek isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) dalam Model Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi di SMP Negeri 5 Yogyakarta telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung oleh sistem pelaksanaan berbasis daring serta petunjuk teknis yang jelas. Kebijakan ini mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat sekitar sekolah. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi, persebaran kualitas sekolah yang belum merata, serta kendala administratif dalam proses penerimaan peserta didik baru. Selain itu, kebijakan zonasi juga memberikan dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan zonasi dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya sekolah, serta dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** kebijakan zonasi; ppdb; implementasi kebijakan; model grindle; pemerataan pendidikan

### Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan zonasi diterapkan sebagai bentuk pemerataan layanan pendidikan agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses sekolah negeri berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, sistem zonasi juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan nonfavorit serta meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Implementasi kebijakan zonasi PPDB dalam praktiknya menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat maupun pihak sekolah. Kebijakan ini dinilai mampu memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan negeri yang lebih merata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, persebaran kualitas sekolah yang belum merata, hingga munculnya praktik manipulasi administrasi demi memperoleh akses ke sekolah tertentu.

Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang menerapkan sistem zonasi PPDB secara aktif pada jenjang sekolah menengah pertama. SMP Negeri 5 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah negeri di pusat kota memiliki tingkat minat pendaftar yang tinggi sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan zonasi PPDB. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi zonasi di sekolah-sekolah negeri Yogyakarta secara umum telah berjalan sesuai petunjuk teknis

dan didukung oleh sistem daring, namun masih terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat serta ketimpangan persebaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait pelaksanaan kebijakan zonasi pada tingkat sekolah.

Penelitian ini menggunakan perspektif Model Grindle dalam menganalisis implementasi kebijakan zonasi PPDB. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Aspek isi kebijakan mencakup kepentingan yang dipengaruhi, manfaat kebijakan, serta perubahan yang ingin dicapai, sedangkan konteks implementasi meliputi kekuasaan aktor pelaksana, karakteristik lembaga, hingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Yogyakarta secara lebih komprehensif.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berbentuk studi kasus (*case study*) yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Yogyakarta pada tahun 2026. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari perspektif internal sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian. Populasi penelitian meliputi pihak sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih terdiri atas Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan seorang guru SMP Negeri 5 Yogyakarta yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung di SMP Negeri 5 Yogyakarta selama proses penelitian berlangsung pada tahun 2026. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan Dinas Pendidikan, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Fokus penelitian meliputi perencanaan kebijakan, pelaksanaan dan transparansi proses PPDB zonasi, kendala serta strategi penyelesaiannya, evaluasi internal sekolah, perubahan sebelum dan sesudah penerapan zonasi, dampak positif dan negatif kebijakan, keadilan kebijakan bagi siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas, perubahan beban kerja guru dan kepala sekolah, serta persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Dalam menganalisis implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menekankan dua dimensi utama, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. *Content of policy* mencakup kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dialokasikan. Adapun *context of implementation* meliputi kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta *member checking* untuk memastikan kesesuaian data dan informasi yang diperoleh dari narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Yogyakarta secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun tidak luput dari berbagai tantangan. Analisis implementasi kebijakan dilakukan menggunakan Model Grindle (1980) yang membagi faktor keberhasilan implementasi kebijakan ke dalam dua dimensi besar, yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*).

### A Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Dari aspek Isi Kebijakan, kebijakan zonasi PPDB memiliki tujuan yang sangat jelas dan strategis, yaitu menciptakan pemerataan akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit, serta memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyatakan bahwa pihak sekolah menerima kebijakan ini sudah dalam bentuk yang final, “Kalau informasi tentang kebijakan zonasi SPMB atau PBDB, itu kami dari sekolah tentang kebijaksanaannya itu kan sudah mendapatkan jadi. Sudah dalam bentuk aturan yang sudah jadi. Jadi kita tinggal melaksanakan.” Beliau juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah melakukan pertimbangan yang matang sebelum menetapkan kebijakan tersebut, “Dinas pendidikan, itu tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk kondisi sekolah yang ada di Jogja, sekolah negeri yang ada di Jogja, 16 sekolah negeri... fasilitas yang dimiliki sekolah, macam-macamnya itu pasti sudah dipertimbangkan. Jadi apapun bentuk kebijaksanaan yang sudah ditetapkan, itu pasti sudah yang terbaik.”

Salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa oleh isi kebijakan ini adalah pergeseran karakteristik siswa yang diterima. Sebelum diberlakukannya kebijakan zonasi, SMP Negeri 5 dikenal sebagai sekolah unggulan dengan siswa yang sangat homogen. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan, “Sebelum adanya zonasi, itu kan pendaftaran sesua baru itu kan

bebas. Maksudnya dari sekolah manapun, lingkung manapun, nilai berapapun tidak pandang itu afirmasi atau jaraknya atau mutasi atau bibit unggul atau prestasi, tidak pandang itu ya. Pada saat itu yang dilihat adalah nilai nilai NEM yang nilai dari SD itu. Jadi saat belum ada zonasi maka yang namanya SMP 5 itu pasti NEM-nya adalah NEM yang tertinggi. Jadi yang masuk di sini, itu kalau NEM-nya sedengan bahkan kurang itu nggak akan berani.” Namun setelah kebijakan zonasi diterapkan, komposisi siswa mengalami perubahan yang sangat signifikan. “Dengan adanya zonasi, otomatis kan murid saya heterogen. Macem-macem kan di situ. Ada yang dekat jaraknya, ada yang zona apa yang afirmasi, ada yang prestasi, ada yang mutasi, ada yang bibit unggul. Jadi dari yang low, medium, high ada semua,” ujar Wakil Kepala Sekolah. Guru SMP Negeri 5 juga menguatkan pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa ketimpangan kemampuan siswa antar jalur cukup tinggi, sehingga menyulitkan proses pembelajaran di kelas.

Perubahan ini menunjukkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan oleh kebijakan zonasi cukup tinggi, tidak hanya pada sistem penerimaan siswa saja, melainkan juga berdampak langsung pada proses pengajaran dan manajemen kelas. Meskipun demikian, kebijakan ini berhasil membuka akses yang lebih luas bagi siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyampaikan, “Ya, harusnya ya. Karena dari segala zona mempunyai akses. Jadi, kita kan menerima. Kita tidak bisa menolak yang afirmasi tidak mau, sayangkan. Yang masuk afirmasi, welcome. Yang masuk prestasi, welcome. Bibit unggul, welcome. Mutasi, welcome. Semuanya mari. Silahkan.” Hal ini sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan yang menjadi tujuan utama kebijakan zonasi sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Secara keseluruhan, dari perspektif isi kebijakan, kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Yogyakarta telah mampu mendukung tujuan pemerataan akses pendidikan. Namun, perubahan besar yang terjadi pada komposisi siswa menuntut penyesuaian yang tidak ringan bagi sekolah dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif bagi siswa dengan kemampuan yang sangat beragam.

## **B Konteks Implementasi (Context of Implementation)**

Konteks implementasi memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di tingkat sekolah. Menurut Model Grindle (1980), konteks implementasi melibatkan berbagai faktor di lapangan yang memengaruhi jalannya kebijakan, di antaranya adalah pelaksanaan teknis di lapangan, tingkat transparansi proses, efektivitas sosialisasi, kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaan, serta berbagai dampak yang timbul baik positif maupun negatif akibat dari kebijakan tersebut. Konteks ini menjadi krusial karena meskipun isi kebijakan sudah baik, tanpa dukungan konteks implementasi yang kuat, maka tujuan kebijakan sulit tercapai secara optimal di tingkat sekolah.

### **1. Pelaksanaan, Transparansi, dan Sosialisasi**

Pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Yogyakarta dilakukan dengan mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pihak sekolah berperan sebagai pelaksana kebijakan yang menerima aturan dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kemudian melaksanakannya sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan bahwa “kami dari sekolah tentang kebijaksanaannya itu kan sudah mendapatkan jadi. Sudah dalam bentuk aturan yang sudah jadi. Jadi kita tinggal melaksanakan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan, tetapi memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kebijakan zonasi di SMP Negeri 5 Yogyakarta juga didukung dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Pendidikan sebelum pelaksanaan PPDB dimulai. Sosialisasi tersebut diberikan kepada pihak sekolah agar seluruh pelaksana memahami aturan, mekanisme, dan prosedur terbaru dalam PPDB zonasi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan bahwa “sebelum melaksanakan SPMB di sekolah itu kan kami selalu diundang dinas untuk disosialisasikan kebijaksanaan yang seperti apa.” Hal serupa juga disampaikan oleh Guru SMP Negeri 5 Yogyakarta yang menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan dalam beberapa tahap dan melibatkan kepala sekolah, ketua tim PPDB, serta operator sekolah. Guru tersebut menyampaikan bahwa “biasanya yang diundang adalah Kepala Sekolah beserta Ketua Tim PPDB-nya,” kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi teknis kepada operator sekolah terkait penginputan data dan mekanisme pelaksanaan PPDB berbasis sistem daring.

Dari aspek transparansi, pelaksanaan PPDB zonasi di SMP Negeri 5 Yogyakarta dinilai telah berjalan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Sistem seleksi dilakukan secara daring melalui website sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan hasil seleksi secara langsung. Guru SMP Negeri 5 Yogyakarta menjelaskan bahwa “untuk proses seleksi di Kota Jogja itu sudah transparan karena semuanya bisa diakses melalui website.” Transparansi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui proses seleksi tanpa harus datang langsung ke sekolah serta membantu meminimalkan potensi kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru. Selain itu, pihak sekolah juga melakukan sosialisasi internal dan diskusi bersama tim PPDB agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan yang berlaku. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan bahwa setiap informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan akan dibahas bersama oleh tim sekolah sebelum diterapkan dalam pelaksanaan PPDB. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan adanya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Yogyakarta dapat berjalan dengan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan, transparansi, dan sosialisasi kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Yogyakarta telah dilaksanakan secara cukup baik melalui koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan, membangun koordinasi, serta menciptakan komunikasi yang efektif kepada kelompok sasaran kebijakan.

### **2. Kendala dalam Penerapan Kebijakan Zonasi dan Strategi Mengatasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Guru SMP Negeri 5 Yogyakarta, pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB secara umum telah berjalan dengan baik, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi sekolah adalah kurangnya pemahaman orang tua terhadap alur dan mekanisme PPDB zonasi yang setiap tahun mengalami perubahan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan bahwa “kendala yang kita hadapi itu satu, kesulitan orang tua untuk memahami alur. Alurnya itu agak membingungkan.” Kondisi tersebut menyebabkan banyak orang tua datang ke sekolah untuk menanyakan prosedur pendaftaran, persyaratan administrasi, maupun jalur penerimaan yang tersedia. Selain itu, perubahan aturan dari tahun sebelumnya membuat masyarakat masih menggunakan pemahaman lama sehingga sering terjadi kebingungan saat proses pendaftaran berlangsung.

Kendala lain yang ditemukan adalah adanya miskomunikasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan terkait persyaratan administrasi dan teknis pelaksanaan PPDB. Guru SMP Negeri 5 Yogyakarta menjelaskan bahwa “kadang terjadi agak sedikit miskomunikasi antara kami sama dinas. Jadi misalnya ada masalah terkait berkas ini, berkas itu.” Akibatnya, sekolah harus melakukan koordinasi kembali dengan dinas untuk memperoleh kejelasan informasi sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sekolah juga menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran akibat heterogenitas kemampuan siswa setelah penerapan zonasi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa sebelum adanya zonasi, siswa di SMP Negeri 5 cenderung homogen dengan kemampuan akademik tinggi, sedangkan setelah zonasi diterapkan kondisi siswa menjadi lebih beragam. Beliau menjelaskan bahwa “dengan adanya zonasi, otomatis murid saya heterogen. Ada yang low, medium, high ada semua.” Kondisi tersebut membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses belajar secara optimal.

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, sekolah menerapkan beberapa strategi. Strategi utama yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan sosialisasi internal sekolah setelah menerima arahan dari Dinas Pendidikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan bahwa “setiap ada kebijaksanaan baru, kita sosialisasikan bersama, kita pahami bersama.” Tim PPDB sekolah melakukan diskusi untuk menyamakan pemahaman terhadap aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, sekolah juga aktif melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan apabila terdapat ketidakjelasan informasi maupun kendala teknis selama proses PPDB berlangsung. Sekolah juga melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan PPDB setiap tahun. Evaluasi dilakukan hampir setiap hari selama proses PPDB berlangsung untuk mengetahui berbagai kendala yang muncul di lapangan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan bahwa “ketika kita hari itu menemukan kendala, langsung kita selesaikan.” Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi sekolah untuk memperbaiki pelayanan pada pelaksanaan PPDB tahun berikutnya. Dalam bidang pembelajaran, guru juga dituntut lebih inovatif dalam mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas yang heterogen. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa guru harus “lebih inovatif mencari metode pembelajaran yang di kelas itu seluruh anak, baik yang kebutuhannya dari low, medium, high itu semuanya ter-cover.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi tidak hanya menuntut kesiapan administrasi sekolah, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, terutama guru, dalam menghadapi keberagaman kemampuan siswa. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesiapan pelaksana kebijakan, koordinasi antaraktor, serta kemampuan institusi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan.

### 3. Dampak Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan zonasi PPDB memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Dampak positif yang paling dirasakan adalah meningkatnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya berbagai jalur penerimaan seperti afirmasi, prestasi, mutasi, dan zonasi wilayah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari berbagai latar belakang ekonomi untuk masuk ke sekolah negeri. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan bahwa “semua kalangan di masyarakat itu kan ada jalurnya yang diberi kesempatan untuk masuk di sekolah negeri.” Beliau juga menjelaskan bahwa sebelum adanya zonasi, siswa yang diterima di SMP Negeri 5 mayoritas merupakan siswa dengan nilai akademik tinggi dan berasal dari keluarga yang memiliki fasilitas belajar lebih baik. Setelah sistem zonasi diterapkan, siswa dari keluarga kurang mampu juga memperoleh kesempatan untuk diterima di sekolah negeri favorit.

Selain memperluas akses pendidikan, kebijakan zonasi juga mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Kondisi kelas yang heterogen membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa “guru harus lebih inovatif mencari metode pembelajaran.” Guru SMP Negeri 5 Yogyakarta juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena guru harus mampu melayani siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Kebijakan zonasi juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya heterogenitas kemampuan siswa di dalam kelas sehingga proses pembelajaran menjadi lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan bahwa sebelum zonasi diterapkan “yang masuk di sini adalah anak yang nilainya NEM tinggi semua,” sedangkan setelah zonasi diterapkan siswa yang diterima berasal dari berbagai jalur dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan guru tidak dapat menggunakan metode pembelajaran yang sama seperti sebelumnya karena harus menyesuaikan kebutuhan setiap siswa di kelas. Dampak negatif lainnya berkaitan dengan prestasi akademik sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa keberagaman kemampuan siswa menyebabkan rata-rata nilai akademik sekolah menjadi lebih sulit

dipertahankan. Beliau menjelaskan bahwa “kalau sekarang misalnya ada siswa yang nilainya 50, 60, 70, itu kan kalau dirata-rata bisa turun.” Selain itu, persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit juga dinilai belum sepenuhnya berubah. Guru SMP Negeri 5 Yogyakarta menyampaikan bahwa “persepsi masyarakat akan ada sekolah favorit itu masih.” Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan zonasi.

Meskipun demikian, sekolah tetap berupaya mempertahankan kualitas pendidikan melalui berbagai strategi pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memiliki tujuan positif dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan, namun implementasinya juga memunculkan tantangan baru dalam proses pembelajaran dan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan implementasi, karakteristik kelompok sasaran, serta kemampuan pelaksana kebijakan dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lapangan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Yogyakarta telah mendukung upaya pemerataan akses pendidikan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas kepada siswa dari berbagai latar belakang untuk memperoleh pendidikan di sekolah negeri. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesiapan sekolah dalam menjalankan aturan, kemampuan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, serta koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB. Meskipun demikian, pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit, kesenjangan kemampuan akademik siswa, serta pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai sistem zonasi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan zonasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan sosialisasi yang efektif, pemerataan mutu pendidikan antar sekolah, serta kesiapan sumber daya pendidikan agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 7(3), 129-135.
2. Ambarwati, R. (2022). Evaluasi implementasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri I Kapas Kabupaten Bojonegoro. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 5(4), 1-12.
3. Anam, K., & Rodyah, I. (2024). Implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 199-213.
4. Anggraeni, A., Helpiastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat smp di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 5234-5241.
5. Datuk, A., & Suhono, S. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2), 20-33.
6. Dewi, R. C., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi SMP negeri di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 49-65.
7. Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
8. Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 73-86.
9. Haryanti, A. (2020). Implementasi kebijakan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 134-148.
10. Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sekolah menengah atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 70-82.
11. Kemendikbud. (2019). Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Khodijah, S. (2025). Evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kota Bandung (studi kasus pada PPDB di Kecamatan Sukajadi). *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(2), 90-96.
13. Lestari, N. S., Hanafi, I., & Mardiyono, M. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 219-227.
14. Lijan Poltak Sinambela. 2014. *Metodologi Penelitian kuantitatif*, CV. Graha Ilmu. Yogyakarta.
15. Moelong L. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
16. Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisatra, J., & Bkti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23.
17. Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424-438.
18. Setiawati, N. D., & Rahaju, T. (2022). Implementasi Kebijakan sistem zonasi PPDB di Sekolah menengah Pertama negeri 3 Krian kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 609-620.
19. Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

20. Setiyanti, H. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada SMPN Kecamatan Temanggung). *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2).